

Masalah dan Solusi Model Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syari'ah

Sri Maulida

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
*srimaulida@unlam.ac.id

Ahmad Yunani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang masalah dan solusi dari segi aspek keuangan syari'ah tentang pengembangan pembiayaan pertanian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dikombinasikan dengan pendekatan eksploratif deskriptif dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Pendekatan teori atau konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan internet. Semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam satu susunan kerangka pemikiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah pada sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syari'ah, oleh karena itu perlu diterapkannya konsep pembiayaan untuk petani melalui Koperasi Keuangan Syariah atau Baitul Maal bi Tamwil (BMT) menggunakan akad Bai' Salam dengan sistem "Kelompok".

Kata Kunci: Pembiayaan, Pertanian, Keuangan Syari'ah, BMT, Bai Salam.

ABSTRACT

This study aims to discuss about the problems and solutions in terms of sharia financial aspects of the development of agricultural financing. This study used multiple linear regression analysis with ordinary least square method (OLS) combined with descriptive explorative approach and developed by using literature review approach or literature study. The theory or conceptual approach is done by referring from several sources, such as books, scientific journals, and the internet. All existing idea descriptions are combined in a single frame of thought. The results showed that the variable of problem financing in agriculture sector had a significant negative effect on the profitability of syari'ah banking, therefore the application of financing concept for farmers through Sharia Finance Cooperative or Baitul Maal bi Tamwil (BMT) using Bai 'Salam ".

Keywords: Financing, Agriculture, Sharia Finance, BMT, Bai' Salam.

PENDAHULUAN

Pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku ekonomi merupakan komitmen pemerintah dalam pembangunan ekonomi saat ini (Heliantina, 2017). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong oleh beberapa sektor, salah satu sektor yang terus ditingkatkan secara berkesinambungan oleh pemerintah adalah sektor pertanian. Menurut data BPS pada tahun 2016 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 37.770.165 jiwa, sektor ini sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lain. Namun, meskipun sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja pada kenyataannya masih terdapat banyak petani yang berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa penyebab diungkapkan salah satunya adalah kegagalan panen yang menyebabkan petani kehabisan modal selain itu juga membuat lembaga keuangan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor ini. Karena hal tersebut artinya petani mengalami kesulitan untuk membantu perkembangan budidaya tani hanya menyesuaikan dengan modal yang mereka punya.

Data Bank Indonesia (2007) menyebutkan bahwa penyaluran kredit Perbankan Nasional terhadap sektor pertanian menempati posisi ke empat setelah sektor jasa, perindustrian, dan perdagangan dengan persentase 5,4 % dari total seluruh penyaluran kredit perbankan Nasional. Dari sisi keuangan, perbankan pada khususnya selain sebagai lembaga intermediasi juga berorientasi pada keuntungan. Sehingga adanya orientasi tersebut membuat perbankan cenderung lebih memilih sektor yang memberikan keuntungan pasti dan menghindari sektor yang berisiko tinggi yang membuat pembiayaan bermasalah meningkat. Perilaku tersebut dilakukan oleh perbankan karena batas pembiayaan bermasalah maksimal tidak boleh melebihi dari angka 5%.

Selain konsep tersebut, sistem pinjaman yang mengharuskan nasabah mempunyai agunan dan membayar bunga pun menjadi masalah karena pertanian tidak mempunyai hasil bulanan, perputaran uang petani menunggu ketika masa panen tiba. Adanya permasalahan tersebut, peran perbankan syari'ah sangat penting kontribusinya, karena akad-akad pada Perbankan syari'ah lebih mengakomodir kebutuhan petani dibanding perbankan konvensional pada sektor pertanian, dikarenakan perbankan syariah menggunakan prinsip jual beli dan bagi hasil dimana karakteristiknya sudah terbiasa dilakukan oleh petani seperti maro dan gaduhan.

Hasyim (2017) menyebutkan untuk menjaga keberlanjutan dampak positif proyek pengembangan sektor pertanian, diperlukan dukungan dari berbagai *stakeholders*, antara lain untuk memperkuat aspek permodalan koperasi, pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pengurus koperasi, serta pelatihan/edukasi keuangan (*financial literacy*) dan pelatihan kewirausahaan bagi nasabah/debitur koperasi. Dalam keuangan syariah koperasi disebut dengan Baitul Maal Tamwil (BMT). Dimana BMT tidak terikat dengan kebijakan dari BI yang menekankan angka pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah, kontribusi pakar praktisi bisnis, maupun akademisi untuk memberikan daya pendorong pengembangan pembiayaan sektor pertanian ataupun memberikan alternatif pemecahan masalah terkait permasalahan permodalan secara inklusif. Apabila ditelaah lebih lanjut dari sudut pandang perbankan, maka penyaluran permodalan usaha pada sektor pertanian tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari faktor perbankan maupun faktor kebijakan yang tepat. Sehingga yang menjadi fokus kajian ini adalah membahas mengenai masalah dari sisi perbankan dan solusi kebijakan dari aspek keuangan syariah sebagai daya pendorong perkembangan pembiayaan sektor pertanian. Kajian ini lebih lanjut diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pemasar perbankan syariah dalam menyusun strategi untuk lebih dekat dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi sektor riil yang sangat membutuhkan dukungan untuk berkembang, dalam konteks ini adalah sektor pertanian. Selain hal tersebut perlu adanya pelatihan dan pendampingan (*mentoring*) bagi petani untuk benar-benar dapat meraktualisasi skema pembiayaan sesuai syariah. Pembimbingan tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan kerja untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

Berkaitan dengan pemaparan di atas berikut beberapa penelitian terkait diantaranya adalah, *pertama*, penelitian Kholistiyah (2010) yang menjelaskan bahwa variabel pembiayaan sektor ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian; sektor pertambangan; sektor konstruksi; sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi; sektor jasa dunia usaha; dan sektor lain- lain mempengaruhi laba pada Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). *Kedua*, Widyaningrum dan Septiarini (2015) menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS di Indonesia. *Ketiga*, penelitian

Adi (2012) yang menjelaskan bahwa 59% responden menyatakan cara jual beli Salam baik untuk diterapkan selain itu dijelaskan bahwa Harga dari Bai' Salam relatif terhadap sistem ijon berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan untuk menggunakan akad Bai' Salam. *Keempat*, Roziq dkk (2014) menjelaskan bahwa model pembiayaan salam untuk petani singkong oleh lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) dan usaha kecil berbahan singkong dapat diterapkan dengan pembiayaan salam paralel dengan model Istishna serta cara memodifikasi cara pembayaran seperti pembiayaan murabahah. Kemudian Asaad (2011) menjelaskan bahwa peranan bank syariah untuk pembiayaan usaha pertanian menggunakan strategi memberikan pembiayaan syariah seperti *al-Muzâra'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)*, *Bai' al-salâm (in front payment sale)*; *Bai' al-murâbahah (differed payment sale)*, dan *al-Rahn*. *Keenam*, Criana (2013) menjelaskan bahwa perilaku ekonomi anggota KPPK yang terdiri dari perilaku ekonomi di bidang: produksi, distribusi, konsumsi, investasi, menabung dan simpan pinjam bila dikaitkan dengan enam tata nilai dasar sistem tanggung renteng yang terdiri dari kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, percaya, disiplin dan tanggung jawab akan memberikan makna bagi perubahan perilaku ekonomi dalam hal menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap dan kebiasaan menjadi lebih berkualitas. *Terakhir*, Afriyandi (2015) menjelaskan bahwa mekanisme tanggung renteng dalam aplikasi pemberian pembiayaan kepada anggota dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang, *pertama*, permasalahan akad Bai' Salam tidak dilaksanakan di sektor pertanian karena kewaspadaan perbankan terhadap NPF. *Kedua*, menelaah lebih lanjut bagaimana solusi terhadap sistem pengembangan pembiayaan pertanian dengan judul “**Masalah dan Solusi Model Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syari'ah**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis analisis regresi linier berganda. Langkah pertama dalam teknik analisis regresi linier berganda sebelum persamaan model regresi terbentuk adalah melakukan uji asumsi klasik yakni uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedisitas. Setelah seluruh uji asumsi klasik terpenuhi,

maka langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien determinasi (R²) dan uji hipotesis yakni uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh data diolah dengan menggunakan bantuan piranti lunak Eviews 8. Berikut model yang digunakan dalam teknik analisis regresi linier berganda :

$$ROA_t = \beta_0 + \beta_1 \text{PEMBIAYAANSEKTORPERTANIAN}_t + \beta_2 \text{NPF}_t + \varepsilon_t$$

Ket : Variabel Independen (Y) = ROA (Profitabilitas)
Variabel Dependen (X1) = Pembiayaan Sektor Pertanian
Variabel Dependen (X2) = NPF (Pembiayaan Bermasalah) Sektor Pertanian

Untuk pendekatan eksploratif deskriptif digunakan untuk mengetahui solusi dalam pengembangan pembiayaan pertanian. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Pendekatan teori atau konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan internet. Semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam satu susunan konsep.

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung (ROA) didapatkan bahwa variabel pembiayaan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel ROA sedangkan variabel NPF sektor pertanian mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA, artinya semakin rendah angka pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah maka akan semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perbankan syariah dan sebaliknya. Adapun pengaruh variabel NPF sektor pertanian terhadap variabel ROA dengan nilai R² sebesar 53,44%. Karena hal tersebut maka perbankan syariah waspada dengan pembiayaan menggunakan akad Bai' salam, satu sisi akad Bai' salam sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan.

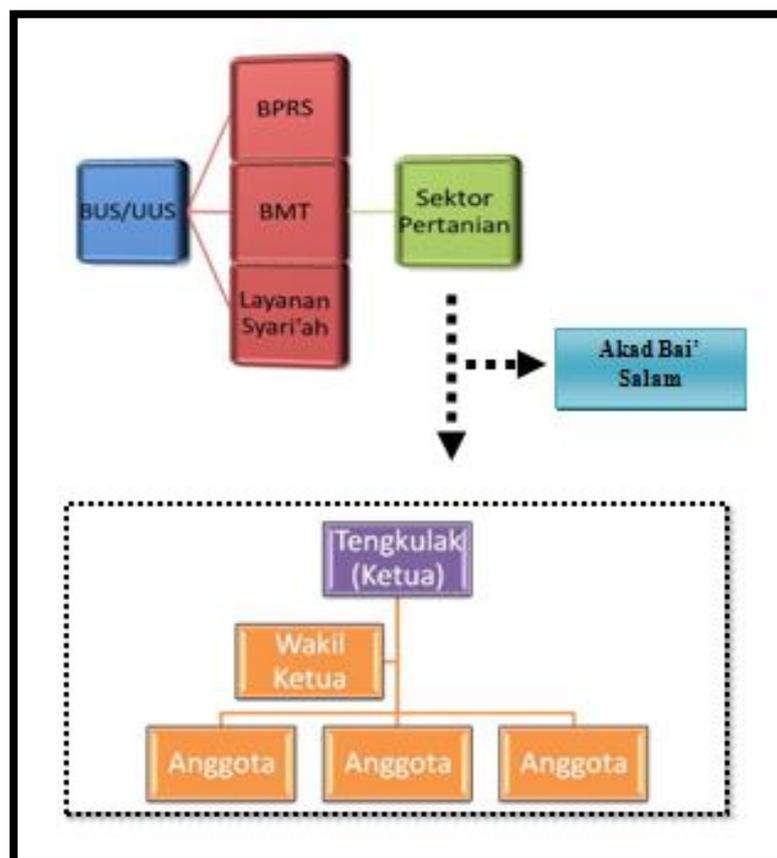
Untuk mengatasi dengan masalah tersebut maka peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional salah satunya adalah dengan strategi meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi, dan BMT. Kebijakan kerja sama yang diarahkan dengan tujuan

untuk memperkuat komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian, seperti mendorong peningkatan alokasi pembiayaan pertanian. Berikut beberapa kebijakan yang dapat dijadikan peluang untuk sektor pertanian mengembangkan usahanya dari segi permodalan, *pertama*, Perbankan syariah mempermudah penyaluran pembiayaan dengan melakukan *linkage* antara bank umum dengan BPRS atau lembaga keuangan, melalui jaringan/unit mikro yang berdiri sendiri atau melekat pada kantor cabang bank, dan partisipasi dalam penyaluran KUR (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK, 2013). *Kedua*, Perbankan syariah mempunyai pengaturan, pengawasan dan monitoring yang efektif, berkelanjutan dan terintegrasi secara *cross sector*, antara lain melalui kajian struktur dan interkoneksi sistem keuangan syariah beserta identifikasi *fair playing field* antara perbankan syariah dengan non-perbankan syariah termasuk kaitannya dengan pengembangan akses keuangan agar mudah dalam mengakses modal.

Untuk menghadapi peluang tersebut perlu ada beberapa faktor yang diterapkan dalam menjawab permasalahan yang ada. Berikut penulis merangkum beberapa faktor pendorong ekonomi di beberapa negara, *pertama*, memanfaatkan struktur masyarakat tradisional dan BMT. Perlunya Kampanye dan penyelarasan pengetahuan dengan Tokoh masyarakat Islam setempat untuk memacu kesadaran konsumen (Salman dkk, 2014). Selain itu struktur masyarakat tradisional juga dapat di arahkan kepada perbankan syariah yang lebih merakyat seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), karena peran pembiayaan syariah besar terhadap kinerja usaha berbasis Syariah (Hamzah dan Gazali, 2015). Memperbanyak jumlah koperasi syariah atau BMT menurut penelitian Noviarini (dkk, 2015) memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian dengan mengembangkan usaha mikro dan kecil di Indonesia karena petani mendapat peningkatan keuntungan dan ekspansi usaha setelah mendapat dana dari instansi BMT. Memperbanyak pelayanan dengan membuka bank pembiayaan syariah juga dapat mengembangkan petani dan peran dari investor pemilik modal serta badan usaha (lembaga non keuangan) harus mampu menyediakan dana yang dibutuhkan untuk mereka sebagai bentuk kerjasama bukan sebagai Kreditor (Bazza dkk, 2014). *Kedua*, Proses Pembiayaan yang memudahkan proses aplikasi pinjaman untuk petani agar petani tidak kesulitan dalam mengajukan pinjaman karena jumlah dokumentasi yang diperlukan sangat banyak dan proses persetujuan yang panjang (melebihi lebih dari beberapa bulan). Oleh karena itu,

perbankan syariah perlu merampingkan proses dan fokus pada membangun hubungan dengan Petani atau kepada calon nasabah (Saymeh dan Sabha, 2014). Proses aplikasi yang mudah juga harus didukung akses yang mudah terhadap Keuangan oleh petani dengan menargetkan 50 persen petani yang layak diberikan pinjaman (Alauddin dan Chowdhury, 2015).

Menurut Wahyudi (2011) Karakteristik usaha pertanian yang mengandung banyak risiko menyebabkan minat lembaga perbankan untuk mendanai sektor ini relatif rendah. Rendahnya keberpihakan perbankan pada bidang pertanian ini menjadi salah satu penyebab sektor pertanian seakan tidak beranjak maju. Petani masih kesulitan untuk mengembangkan usaha taninya karena keterbatasan modal dari perbankan. Karena itu, salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif oleh petani adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Berikut Gambar implementasi pembiayaan Bai' Salam yang dapat diterapkan melalui BMT.



Sumber : Gambar diolah (2017)

Gambar 1
Konsep Pengembangan Pembiayaan Pertanian

1. Untuk mengantisipasi permasalahan NPF perbankan syariah terkait regulasi OJK, maka kebijakan perbankan syariah yang harus menyalurkan dananya ke lembaga keuangan mikro dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembiayaan pertanian dengan akad Bai' Salam.
2. Lembaga keuangan mikro syaria'ah yang tidak terkait regulasi adalah BMT. Sehingga dana tersebut dikelola oleh BMT untuk disalurkan ke petani dengan akad Bai' Salam.
3. BMT kerja sama dengan Tengkulak di setiap desa, dimana Tengkulak sebagai penanggung jawab atas kelompok tani. Setiap Tengkulak dapat membawahi beberapa kelompok tani.
4. Kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang.
5. Akad Bai' Salam dilaksanakan antara BMT dengan Petani kemudian BMT dengan Tengkulak.
6. Mekanisme pencairan dana dilakukan setelah kelompok tani diberikan pelatihan oleh petugas BMT.
7. Pada akad salam jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, b. menunggu sampai barang tersedia.
8. Untuk mencapai kemaslahatan bersama, maka ketika kontrak di siapkan pada awal perjanjian. Untuk huruf a jika terjadi kegagalan panen salah satu petani maka dapat diberlakukan tanggung renteng, artinya ketika salah satu anggota mengalami kesulitan maka anggota lain turut membantu dalam pemenuhan barang sesuai perjanjian dengan BMT.
9. Untuk kelompok yang ada dalam kategori lancar maka untuk tahap berikutnya dapat dilakukan pembiayaan kembali dengan plafon lebih besar, dan untuk kelompok yang tidak lancar akan dibubarkan, namun anggota yang lancar dapat bergabung dengan kelompok lain yang masih mendapatkan pembiayaan tahap selanjutnya. Hal tersebut sebagai antisipasi agar orang-orang dalam kelompok profesional dan saling membantu.

KESIMPULAN

Hasil analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung (ROA) didapatkan bahwa variabel pembiayaan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel ROA sedangkan variabel NPF sektor pertanian mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA, artinya semakin rendah angka pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah maka akan semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perbankan syariah dan sebaliknya. Adapun pengaruh variabel NPF sektor pertanian terhadap variabel ROA dengan nilai R^2 sebesar 53,44%. Lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif oleh petani adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Bai' Salam yang dapat diterapkan melalui BMT menggunakan akad Bai' Salam dengan sistem "Kelompok". Sehingga masalah Pembiayaan bermasalah dan Profitabilitas dapat dipecahkan dengan solusi "linkage" keuangan inklusif.

Perbankan syariah sebaiknya mempermudah proses akses modal oleh petani. Jika BMT tidak bisa mengimplementasikan maka dapat dibuat anggaran desa untuk membuat Koperasi Unit Desa Syariah, dimana dana desa dapat digunakan untuk kesejahteraan petani. Selain itu pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat mendorong perkembangan pembiayaan pertanian dengan peningkatan informasi atau keuangan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fajar. 2012. Analisis Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian Dengan Menggunakan Akad Bai' Salam (Studi Kasus Pada Petani Di Kabupaten Bogor). *Artikel Ilmiah UI*.
- Afriyandi, Yuli. 2015. Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural. *Journal of Islamic Economics Lariba*, Volume 1, Issue 1.
- Alauddin dan Mustafa Manir Chowdhury. 2015. Small and Medium Enterprise in Bangladesh-Prospects and Challenges. *Global Journal of Management and Business Research: C Finance Volume 15 Issue 7 Version 1.0 Year 2015 Global Journals Inc. (USA)*. Online ISSN: 2249-4588 & Print ISSN: 0975-5853.
- Asaad, Mhd. 2011. Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. *MIQOT Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011*.
- Bazza, Mohammed Isah, Bashir Yusuf Maiwada dan Bashir Ahmad Daneji. 2014. Islamic Financing: A Panacea To Small And Medium Scale Enterprises Financing

- Problems In Nigeria. *European Scientific Journal April 2014 edition vol.10, No.10 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.*
- Çriana, Sjahandari. 2013. Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Humaniora, Hal 265-273.*
- Hasyim, Muhammad. 2017. BI-Dukung-Inovasi-dan-Intervensi-Pembiayaan-di-Sektor-Pertanian dapat di akses melalui web www.bi.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) 2015.* Jakarta: Indonesia. Tersedia di www.ojk.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan. 2013. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Roziq, Ahmad dkk. 2014. Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong Dan Usaha Kecil Berbahan Singkong Di Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember.* Vol. 12 No. 2 Des 2014.
- Saymeh, Abdul Aziz Farid dan Dr. Sulieman Abu Sabha. 2014. Assessment of Small Enterprise Financing, Case of Jordan. *Global Journal of Management and Business Research: C Finance Volume 14 Issue 2 Version 1.0 Year 2014 Publisher: Global Journals Inc. (USA). Online ISSN: 2249-4588 & Print ISSN: 0975-5853.*
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/8/DPBS tanggal 27 Maret 2013.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.
- Wahyudi. Ach Firman. 2011. BMT untuk Sektor Pertanian. *Jurnal Ekonomi Islam Republika, Iqtishodia, edisi kamis 24 November 2011.*
- Widyaningrum, Linda dan Dina Fitriasia Septiarini. 2015. Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014. *JESTT Vol. 2 No. 12 Desember 2015.*